

**MENYELISIK PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMILIKI
KECENDERUNGAN KESESATAN BERPIKIR ATAS KONSEP PERJANJIAN
KREDIT DAN JAMINAN (KAJIAN ARGUMEN HAKIM ATAS KASUS PT
MIMI KIDS GARMINDO DENGAN NOMOR PERKARA:
482/PDT.G/2016/PN.BDG)**

**Stella Priscilla
1487072**

ABSTRAK

Salah satu produk hukum Indonesia adalah Undang-Undang Perbankan. Kredit menjadi krusial karena masyarakat membutuhkan fasilitas keuangan dalam kegiatan investasi dan usaha. Walaupun secara normatif telah diatur berbagai peraturan perundang-undangan, dalam kenyataannya tetap terjadi kesenjangan dalam praktik. Berbagai putusan pengadilan belum mengakomodir rasa keadilan para pelaku bisnis, bank, dan debitur. Salah satunya dengan menyelidik pertimbangan hakim dalam putusan atas kasus PT Mimi Kids Garmino dengan nomor perkara: 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian Hak Tanggungan, yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit, yang merupakan perjanjian pokok, dapat dihapuskan sebelum perjanjian pokoknya berakhir. Hal tersebut bertentangan dengan teori, doktrin, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perjanjian *borgtocht* yang digunakan dalam kasus ini juga dipahami secara keliru.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan metode dekriptif analitis yaitu menggambarkan atau menganalisis hukum yang menjadi fokus peneliti yang menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Bank Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, disertasi, artikel dan internet. Sifat penelitiannya adalah bersifat perspektif yang mempelajari tujuan hukum, konsep hukum dan norma hukum dari peraturan terkait perjanjian kredit dan jaminan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penerapan analisis deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses *takeover* kredit yang dilakukan oleh Bank Nusantara Parahyangan Tbk., selaku kreditur dari PT Mimi Kids Garmino tidak melanggar perundang-undangan Perbankan. Selanjutnya terdapat unsur-unsur kekeliruan/ kesesatan berpikir yang disebabkan oleh kekeliruan pada gugatan serta pendapat ahli yang menjadi salah satu unsur pertimbangan hakim. Hal tersebut menyebabkan adanya unsur kekeliruan/kesesatan berpikir di dalam putusan tersebut. Apabila putusan seperti itu menjadi Yurisprudensi maka akan memiliki dampak hukum yang besar terhadap Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kesesatan berpikir secara yuridis, argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa, dan juga pendapat ahli di pengadilan dapat mempengaruhi dan memungkinkan dikeluarkannya putusan Majelis Hakim yang menentang argumen hukum. Diharapkan para Hakim selayaknya melihat setiap kasus yang ada secara komprehensif agar terhindar dalam mengeluarkan putusan-putusan yang berisi kesesatan berpikir secara yuridik.

Kunci Kunci: perbankan, perjanjian kredit, jaminan, kesesatan berpikir, perjanjian *accessoir*

**EXPLORING THE JUDGES'S LEGAL REASONING WITH THE
TENDENCY OF FALLACY OVER A CONCEPT OF A LOAN AGREEMENT
AND SECURITY AGREEMENT (THE STUDY OF JUDGES'S ARGUMENT
IN THE CASE OF PT MIMI KIDS GARMINDO WITH CASE NUMBER:
482/PDT.G/2016/PN.BDG)**

**Stella Priscilla
1487072**

ABSTRACT

Act of Banking is one of the product of Indonesian Law. A loan become a crucial towards a society due to its need of financial facilities for business purposes and investment. Although it is already being regulated normatively under the laws and regulations, still in fact the gap remains occurred in practices. Many of court judgement still not accommodate the sense of justice of businessman, banks and debtors. As an example by exploring the Judges's legal reasoning of court verdict in the case number 482/PDT.G/2016/PN.BDG of PT Mimi Kids Garmino, which was verdicted by the Judges of District Court Class 1A Bandung, essentially stated that a mortgage deeds which was an ancillary agreement of a loan agreement that stand as the principal agreemeent, could be terminated even before the liability in the principal agreement was fullfilled. Those are contradicting with theories, doctrines, and positive law which applicable in Indonesia. A borgtocht agreement in that case was also mistakenly understood.

The study of law is a normative legal research that used analytical descriptive method by describing or analyzing the law as its main focus. Types of legal materials used are primary legal materials such as Act Of The Republic Of Indonesia Number 7 Of 1992 Concerning Banking, Act Of The Republic Of Indonesia Number 7 Of 1992 Concerning Banking As Amended By Act Number 10 Of 1998, Act of The Republic Of Indonesia Number 4 of 1996 Concerning The Mortgage, The Codification of Civil Law, Regulations by Supreme Court, Indonesia Banking Regulations, and the secondary legal materials such as literature, journal, thesis, dissertation, articles and internet. The characteristic of this research is perspective which studying the law purposes, concept of law, and legal norms of the regulations regarding loan agreement and Security Agreement. This reseach uses statute approach and conceptual approach. Qualitative method with application of deductive analysis is used for the data technique analysis. The results of this research are the takeover credit process which was performed by Nusantara Parahyangan Tbk. Bank as the creditor of PT Mimi Kids Garmino was not violated the Act of Banking. Moreover on the legal reasoning components made by the judges, there are elements of fallacy caused by fallibility on the lawsuit and also on the opinion by expert's witness. Those things lead to fallacy on the verdict. If a precedent is made based on this verdict, hence it would bring a great impact of loan agreement law and security agreement law that applicable in Indonesia.

Fallacy in juridical, argumentation which were submitted by the parties in disputes, and also opinion by expert's witness on the trial could affecting the possibility for Judges to make a verdict that against the argumentaion of law. Judges are expected to see every cases comprehensively in order to avoid a verdict that contained fallacy in juridical.

Keywords: banking, loan agreement, security agreement, fallacy, ancillary agreement.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Revisi	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiv
Daftar Tabel	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20

3. Pendekatan (<i>approach</i>)	20
4. Jenis Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KESESATAN BERPIKIR HAKIM DALAM MENGEKSPLORASI	
KASUS PERDATA	26
A. Konsep Berpikir Yuridis Merupakan Spesifikasi Dari Cara Manusia Dalam Menemukan Suatu Penalaran Normatif.....	26
1. Keberadaan Manusia Dalam Masyarakat	26
2. Keberadaan Manusia Dengan Adanya Kegiatan Berpikir	30
3. Kegiatan Berpikir Dalam Konsep Berpikir Yuridis	34
B. Filsafat Hermeneutika Sebagai Dasar Penafsiran Hukum	40
1. Pengertian Umum Mengenai Hermeneutik	40
2. Implikasi Hermeneutik Dalam Berbagai Disiplin Ilmu	41
3. Hermeneutik Dalam Bidang Hukum	42
4. Metode dan Pengertian Penafsiran Hukum.....	43
5. Metode Argumentasi Hukum.....	51
6. Kesesatan Berpikir (<i>Fallacy</i>) Dalam Kegiatan Berpikir.....	55
C. Kerangka Berpikir Hakim Dalam Menyusun Sebuah Putusan.....	69
1. Proses Hakim Dalam Melihat Denah Gugatan	69
2. Pengambilan Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara	78

BAB III PERJANJIAN KREDIT DAN HAK TANGGUNGAN	85
A. Perjanjian Kredit Sebagai Bentuk Perjanjian Dalam Praktek Perbankan.....	85
1. Perkembangan Perjanjian Kredit Dalam Ruang Lingkup Perbankan.....	85
2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Yang Lahir Di Dalam Masyarakat ...	94
3. Asas Hukum Kontrak / Perjanjian.....	98
4. Perjanjian Kredit Merupakan Perjanjian Penunjang Untuk Kegiatan Bisnis.....	103
5. Fungsi Perjanjian Kredit	108
6. Jenis Perjanjian Kredit	109
B. Hubungan Antara Perjanjian Pokok Dan Perjanjian <i>Accessoir</i> Dalam Perjanjian Kredit	113
1. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok	113
2. Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian <i>Accessoir</i>	120
3. Eksistensi Perjanjian <i>Accessoir</i> Sebelum Berakhirnya Perjanjian Pokok	124
C. Hak Tanggungan Sebagai Perjanjian Accesoir Atas Kebendaan Benda Tetap.....	125
1. Pengertian Hak Tanggungan	125
2. Ciri Dan Sifat Hak Tanggungan.....	127
3. Roya Sebagai Bentuk Penghapusan Hak Tanggungan	129
D. <i>Borgtocht</i> Sebagai Bentuk Jaminan Perorangan Dalam Mengurangi Risiko Kredit.....	131
1. Pengertian <i>Borgtocht</i>	131
2. Dasar-Dasar Pembuatan <i>Borgtocht</i>	132

3. Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Garansi / Jaminan.....	133
4. Akibat Hukum Terhadap Penjamin / Guarantor yang Melepaskan Hak Istimewanya.....	135
BAB IV KECENDERUNGAN KESESATAN BERPIKIR DALAM	
MENYELISIK PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KONSEP PERJANJIAN	
KREDIT DAN JAMINAN DENGAN MENGAJAI KASUS PT MIMI KIDS	
GARMINDO.....	138
A. <i>Takeover</i> / Pengambilalihan Yang Dilakukan Oleh Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Atas Fasilitas Kredit PT Mimi Kids Garmino Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perbankan.....	138
1. Proses <i>Takeover</i> / Pengambilalihan Kredit Bank Sebagai Bentuk Peningkatan Fasilitas Kredit Debitur Dalam Praktik Perbankan	138
2. <i>Takeover</i> PT Mimi Kids Garmino Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	145
B. Argumentasi Yuridik Terhadap Putusan Kasus PT Mimi Kids Garmino	154
1. Uraian Kasus PT Mimi Kids Garmino Secara Garis Besar	154
2. Kesesuaian Pemikiran Hakim Dalam Memutuskan Kasus Terhadap Kasus PT Mimi Kids Garmino Dengan Cara Berpikir Argumentasi Yuridik.....	166
C. Dampak Dari Putusan Yang Tidak Sesuai Pada Kredit Dan Jaminan Di Masyarakat.....	178

1. Dampak Terhadap Hukum Kredit dan Jaminan di Indonesia	178
2. Dampak Terhadap Bank dan Masyarakat	182
BAB V PENUTUP.....	185
A. Kesimpulan	185
1. <i>Takeover</i> / Pengambilalihan Yang Dilakukan Oleh Bank Nusantara Parahyangan Atas Fasilitas Kredit PT Mimi Kids Garmino Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perbankan.....	185
2. Kesesuaian Pemikiran Hakim Dalam Memutuskan Kasus Terhadap Kasus PT Mimi Kids Garmino Dengan Cara Berpikir Argumentasi Yuridik.....	186
3. Dampak Dari Putusan Yang Tidak Sesuai Pada Kredit Dan Jaminan Di Masyarakat	188
B. Saran.....	189
1. Akademisi	189
2. Praktisi / Bank.....	189
3. Pemerintah	190
4. Masyarakat	190

Daftar Pustaka

Lampiran

Curriculum Vitae

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1)
- LAMPIRAN II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan (44)
- LAMPIRAN III Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ... (84)
- LAMPIRAN IV Putusan Nomor 482/PDT.G/2016/PN.Bdg
- LAMPIRAN V MATRIX REVISI



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Contoh Argumen Deduktif	39
Tabel 2.2 Contoh Argumen Induktif.....	40
Tabel 3.1 Data Olahan Statistik Perbankan Indonesia.....	107
Tabel 4.1 Rangkuman perbedaan perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian kredit...	167

